

Sistem Etika Politik dan Ideologi Negara dalam Pancasila

**Annisa Rahmi¹, Assyifa Farhanah Syahrul², Ivtah Putri Abidah Siregar³,
Muhammad Satria Sembiring Pelawi⁴, Nurul Hasanah⁵,
Riska Nurasnida Siregar⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: rahminisa0608@gmail.com¹, assyifa.farhanah16@gmail.com²,
ivtahputrisiregar01@gmail.com³, muhammad22satria@gmail.com⁴,
nrulhasanah91@gmail.com⁵, riskanurasnida@gmail.com⁶

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara, mendalam ke dalam nilai-nilai yang membentuknya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pancasila memiliki peran yang mendalam dalam membentuk landasan moral dan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila bukan hanya sekadar ideologi politik, melainkan juga suatu sistem nilai yang menjadi pijakan utama dalam kehidupan politik Indonesia.

Kata kunci: Pancasila, Etika, Ideologi, Negara

ABSTRACT

This research aims to find out Pancasila as a system of political ethics and state ideology, deep into the values that shape it. This research is a type of library research with a qualitative approach. Library research is research conducted using literature (literature) in the form of books, notes and research reports from previous studies. This research reveals that Pancasila has a deep role in shaping the moral foundation and values in the life of the nation and state in Indonesia. Pancasila is not just a political ideology, but also a value system that is the main foothold in Indonesian political life.

Keywords: Pancasila, Ethics, Ideology, State

PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai suatu sistem filsafat, mendasari nilai luhur yang menjadi sumber penjabaran norma-norma dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk moral, hukum, dan kenegaraan. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia yang dapat diukur baik dan buruk serta menciptakan dasar bagi sistem hukum di Indonesia.

Pertama-tama, norma moral mencakup perilaku manusia yang dapat dinilai dari segi kebaikan dan keburukan. Pancasila membentuk kerangka etika yang menjadi

dasar moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, norma hukum merujuk pada sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila menjadi landasan filosofis bagi pembentukan hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan (Arifudin et al., 2022).

Namun, Pancasila bukan semata-mata pedoman normatif atau praksis. Lebih dari itu, ia merupakan suatu sistem nilai-etika yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk norma-norma etika, moral, dan hukum. Sebagai contoh, norma etika politik Pancasila merupakan suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang dijiwai oleh nilai-nilai fundamental Pancasila, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Pancasila, meskipun diakui sebagai dasar negara dan pandangan hidup bersama, saat ini menghadapi tantangan. Ada gejala delegitimasi yang meruncing, di mana keberadaannya sebagai pandangan hidup bangsa tampaknya tidak lagi diakui sepenuhnya. Pancasila, yang pada masa lalu dianggap sakti, kini menghadapi pengakuan yang melemah.

Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini, pertanyaan mendasar muncul. Apakah Pancasila benar-benar menjadi bagian dari identitas dan pandangan hidup masyarakat Indonesia, ataukah ia hanya menjadi slogan politis untuk melegitimasi keberadaan politik dan negara? Peringatan hari Kesaktian Pancasila setiap tahunnya tidak lagi mencerminkan kekuatan moral dan etika politik yang seharusnya dimiliki Pancasila.

Namun, untuk memahami fenomena ini dengan lebih mendalam, diperlukan penelaahan yang luas dari berbagai sudut pandang. Sebagai suatu fenomena, Pancasila tidak hanya perlu dilihat dari luaran yang tampak, tetapi juga harus dipahami esensinya. Akhir-akhir ini, Pancasila mengalami fase delegitimasi, di mana perannya sebagai pandangan hidup bersama semakin terancam.

Dalam upaya mengurai kompleksitas situasi ini, dapat dilihat bahwa Pancasila bukan hanya sebagai pedoman yang diterapkan secara langsung, melainkan juga sebagai representasi nilai-nilai etika yang melekat dalam norma-norma moral, hukum, dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya ada sebagai suatu konsep, tetapi juga hadir dalam praksis kehidupan sehari-hari.

Penting untuk menyadari bahwa Pancasila tidak hanya menjadi landasan moral-etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga merupakan esensi dari identitas dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih besar untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, agar keberadaannya tidak semata-mata menjadi formalitas atau retorika belaka(Yanto, 2017).

Sebagai suatu landasan moral-etik, Pancasila menuntut setiap warga negara dan penyelenggara negara untuk mempelajari, memahami, dan menghayati nilai-nilai tersebut. Etika politik Pancasila mencakup proses pengambilan keputusan yang dijiwai oleh nilai-nilai fundamental Pancasila, yang menjadi dasar filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keberlanjutan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dalam dinamika kehidupan bangsa yang terus berkembang.

Pancasila, sebagai pilar utama negara dan ideologi Indonesia, memuat nilai-nilai yang bersifat universal dan menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai etika politik Pancasila mencakup dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, memberikan landasan moral bagi aktör-aktör politik. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai ini seharusnya membimbing perilaku

pemimpin dan warga negara, mencegah praktik-praktik politik yang melanggar norma moral.

Namun, dalam praktiknya, nilai etika politik Pancasila masih menghadapi tantangan dalam penerapannya di kehidupan politik Indonesia. Keberhasilan implementasi Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara melibatkan pemahaman mendalam tentang konsep tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Pancasila dan mengevaluasi bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara, mendalam ke dalam nilai-nilai yang membentuknya. Selanjutnya, penelitian akan fokus pada penerapan Pancasila dalam kehidupan politik di Indonesia. Dalam hal ini, akan dianalisis sejauh mana pemimpin dan masyarakat umum mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam keputusan politik dan partisipasi warga negara.

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan nilai etika politik Pancasila masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap menjadi ancaman nyata terhadap keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan konkret yang dapat menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila.

Dengan menggali lebih dalam tentang Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemimpin dan warga negara dalam menjalankan kehidupan politik di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih baik dan solusi konkret, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan Pancasila dalam kehidupan politik, mendorong kehidupan politik yang lebih beretika, dan memitigasi risiko praktik politik yang merugikan keutuhan bangsa dan negara.

KAJIAN TEORITIS

A. Pancasila sebagai Sistem Etika Politik

Pancasila, sebagai pilar dasar negara Indonesia, membentuk suatu sistem etika politik yang mendalam, memandu setiap aspek kehidupan politik di negeri ini. Etika politik Pancasila adalah landasan moral yang mengambil akar dari nilai-nilai dasar Pancasila, yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam wacana ini, akan diselidiki dengan rinci masing-masing nilai-nilai ini dan bagaimana mereka membentuk fondasi etika politik yang kuat.

Pertama-tama, nilai ketuhanan dalam etika politik Pancasila menciptakan dasar bagi pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala hukum dan keadilan. Pengakuan ini mencerminkan kedalaman spiritualitas yang mewarnai kehidupan politik Indonesia, menekankan pentingnya moralitas yang berasal dari prinsip-prinsip keagamaan. Dalam konteks ini, Pancasila menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan berbagai aliran keagamaan untuk bersatu demi mencapai tujuan bersama, menjaga pluralitas dan keberagaman agama di Indonesia(Yanto, 2017).

Nilai kemanusiaan, sebagai bagian integral dari etika politik Pancasila, memberikan dasar untuk pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap individu memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi. Konsep manusia sebagai makhluk yang merdeka, sederajat, dan bermartabat menjadi panduan bagi pembentukan kebijakan yang

mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan individu dan penghargaan terhadap hak asasi manusia menjadi titik fokus, memastikan setiap warga negara dapat hidup dalam lingkungan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Nilai persatuan, sebagai landasan etika politik Pancasila, mengakui kepentingan bersama sebagai faktor yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi atau golongan. Paham ini mengekang egoisme yang dapat merusak stabilitas sosial dan politik. Melalui persatuan, Pancasila menciptakan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama, membentuk fondasi politik yang inklusif dan berdikari dari ego sektarian.

Kemudian, nilai kerakyatan menjadi elemen penting dalam etika politik Pancasila, mengakui kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Prinsip ini menuntun pada praktik demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan keputusan. Dengan demikian, setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan, menciptakan tatanan politik yang berakar pada keinginan dan kebutuhan rakyat (Muzakki, 2023).

Terakhir, nilai keadilan dalam etika politik Pancasila memastikan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan dalam memperoleh keadilan. Keadilan sosial menjadi prinsip yang mendorong pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan mengakui hak-hak individu dan kelompok, etika politik Pancasila menciptakan fondasi yang adil dan berkelanjutan untuk perkembangan masyarakat.

Secara keseluruhan, etika politik Pancasila merangkum nilai-nilai luhur yang menggambarkan karakter dan moralitas politik Indonesia. Dengan mendalamnya prinsip-prinsip ini, Indonesia mampu membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan politik yang demokratis, inklusif, dan berlandaskan pada keadilan sosial. Etika politik Pancasila bukan hanya sebuah kerangka kerja, tetapi juga sebuah komitmen mendalam untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan.

B. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, bukan hanya sekadar seperangkat nilai-nilai, tetapi sebuah konsep yang meresap ke dalam jantung kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi negara ini bukan hanya tentang apa yang diyakini, tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut memberikan arah dan makna dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dalam eksplorasi ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang Pancasila sebagai ideologi negara, mengeksplorasi fungsi-fungsinya yang mendasar dan implikasinya yang luas dalam penyelenggaraan negara.

Pancasila, sebagai ideologi negara, memiliki fungsi dasar yang mendasari eksistensinya. Pertama-tama, ideologi ini berfungsi sebagai landasan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menciptakan suatu kerangka moral yang menjadi dasar bagi setiap tindakan individu dan kebijakan pemerintah. Nilai-nilai seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi penuntun yang memberikan arti mendalam pada setiap langkah yang diambil dalam membangun negara.

Fungsi instrumental Pancasila juga tidak dapat diabaikan. Ideologi ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara, menciptakan suatu sistem yang diatur oleh

nilai-nilai dasar Pancasila. Dalam aspek ini, Pancasila bukan hanya sebuah gagasan filosofis, tetapi juga sebuah panduan konkret yang membimbing pembuatan undang-undang, kebijakan publik, dan semua aspek administratif negara. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya hidup di buku-buku teks, tetapi juga di dalam setiap koridor lembaga-lembaga negara.

Fungsi integratif Pancasila menjadi kunci keberlanjutan bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila tidak hanya menjadi semacam ikatan moral, tetapi juga merupakan pemersatu bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Nilai persatuan yang terkandung dalam Pancasila memungkinkan Indonesia untuk tetap kokoh di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan negara ini. Pancasila tidak hanya mendefinisikan identitas negara, tetapi juga mempersatukan jutaan jiwa yang hidup di dalamnya.

Fungsi dinamis Pancasila menciptakan suatu landasan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman. Pancasila bukanlah artefak sejarah yang kaku, melainkan suatu ideologi yang berkembang seiring waktu. Nilai-nilai tersebut memberikan kebebasan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat dan dunia global. Sebagai contoh, nilai keadilan sosial dalam Pancasila dapat memberikan dasar bagi kebijakan yang mengatasi ketidaksetaraan dan keadilan ekonomi di era modern(Siswantara, 2023).

Dalam konteks penyelenggaraan negara, Pancasila memainkan peran yang sangat krusial. Setiap lembaga, setiap kebijakan, dan setiap tindakan pemerintah diukur dan dinilai berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Ini menciptakan suatu sistem yang bukan hanya terorganisir secara hirarkis, tetapi juga memiliki makna moral yang melekat dalam setiap prosesnya. Misalnya, kebijakan ekonomi diarahkan untuk mencapai keadilan sosial, mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata.

Pancasila, sebagai ideologi negara, juga memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian bangsa. Melalui nilai-nilai yang diusungnya, Pancasila menciptakan suatu identitas nasional yang kuat. Identitas ini tidak hanya berbicara tentang warna bendera atau lagu kebangsaan, melainkan juga tentang moral dan etika yang ditanamkan dalam setiap warga negara. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya tentang bagaimana negara diatur, tetapi juga tentang bagaimana setiap individu memahami perannya dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Dalam perjalanan sejarah, Pancasila telah membuktikan diri sebagai pilar kestabilan dan kesatuan di tengah tantangan yang beragam. Konsep ini tidak hanya relevan di era kemerdekaan, tetapi juga tetap menjadi fokus dalam menghadapi tantangan global dan dinamika masyarakat modern. Oleh karena itu, Pancasila bukanlah sekadar warisan sejarah, melainkan juga sebuah instrumen yang memandu negara Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, Pancasila sebagai ideologi negara menciptakan suatu paradigma yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan negara. Fungsi dasar, instrumental, integratif, dan dinamisnya menjadi pilar yang mendukung keberlanjutan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya suatu doktrin politik, melainkan juga suatu keyakinan kolektif yang menggiring bangsa ini ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara tidak dapat diabaikan, tetapi harus terus dijaga dan diperkuat sebagai fondasi yang kokoh bagi bangsa Indonesia yang maju dan beradab(Hamja, 2017).

C. Kaitan antara Pancasila sebagai Sistem Etika Politik dan Ideologi Negara

Pancasila, sebagai sistem etika politik dan ideologi negara Indonesia, membentuk suatu kesatuan konseptual yang erat terkait. Dalam konteks ini, Pancasila bukan hanya menjadi panduan moral dalam kehidupan berpolitik, tetapi juga mencerminkan cita-cita dan tujuan bersama bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan melalui dinamika politik negara. Pada tingkat yang lebih mendalam, keterkaitan antara Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara dapat dilihat dari beberapa dimensi penting.

Pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika politik merupakan penjabaran konkret dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara menjadi kerangka konseptual yang menggambarkan pandangan hidup dan aspirasi bersama masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi pijakan utama dalam pembentukan etika politik. Misalnya, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mengarah pada perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara dalam konteks politik, sementara prinsip persatuan membimbing proses politik untuk mencapai kesatuan dan solidaritas.

Kedua, Pancasila sebagai sistem etika politik harus dijivai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Ini menandakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara harus menjadi pusat motivasi dan moralitas dalam setiap tindakan politik. Etika politik Pancasila menjadi kendaraan untuk menerjemahkan nilai-nilai ideologi ke dalam kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa setiap keputusan politik dan tindakan pemerintah selaras dengan visi dan misi yang terkandung dalam ideologi negara (Sugara & Mutmainnah, 2020).

Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika politik harus diwujudkan dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Konsep ini tidak hanya berhenti pada level teoretis atau retoris, tetapi harus tercermin dalam praktik politik sehari-hari. Hal ini mencakup implementasi kebijakan yang menghormati hak asasi manusia, pemberdayaan rakyat, dan penciptaan keadilan sosial. Pancasila sebagai ideologi negara harus menjadi panduan konkret dalam membentuk regulasi, kebijakan, dan praktik politik yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam melihat keterkaitan ini, etika politik Pancasila berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan ideologi negara dengan realitas politik. Etika politik menjadi alat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ideologi negara ke dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, setiap tindakan politik harus mencerminkan dan menghormati nilai-nilai dasar Pancasila, menciptakan harmoni antara cita-cita dan realitas.

Sebagai contoh konkret, prinsip keadilan sosial dalam ideologi Pancasila menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Etika politik yang berakar pada nilai-nilai ini akan mendorong implementasi kebijakan redistribusi kekayaan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Dengan demikian, tidak hanya terjadi keterkaitan konseptual, tetapi juga transformasi nilai-nilai ideologi menjadi tindakan nyata yang memberikan dampak positif pada masyarakat.

Dalam menjalankan sistem etika politik Pancasila, penting untuk memastikan bahwa setiap pemimpin politik dan penyelenggara negara memahami, menginternalisasi, dan mengimplementasikan nilai-nilai ideologi negara secara konsisten. Pendidikan politik dan pembinaan moral menjadi instrumen penting dalam

memastikan bahwa generasi penerus juga mampu meneruskan tradisi nilai-nilai Pancasila dalam konteks etika politik (Sulistiani Putri & Anggtaeni Dewi, 2020).

Sebagai penutup, keterkaitan erat antara Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara menciptakan fondasi yang kokoh untuk kehidupan berpolitik di Indonesia. Etika politik menjadi alat yang mengubah nilai-nilai ideologi menjadi nyata dalam setiap tindakan politik. Oleh karena itu, menjaga keutuhan dan relevansi Pancasila sebagai panduan moral dan ideologi negara merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pada pemahaman makna dari suatu fenomena yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal yang membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang berpengalaman di bidang Pancasila. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pancasila, sebagai sistem etika politik dan ideologi negara Indonesia, memiliki peran yang mendalam dalam membentuk landasan moral dan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai penelitian telah menyoroti dimensi filosofis, politik, dan moral Pancasila untuk memahami pengaruhnya terhadap kehidupan politik dan ideologi negara di Indonesia.

Penelitian oleh Kaelan (2020) menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar ideologi politik, melainkan juga suatu sistem nilai yang menjadi pijakan utama dalam kehidupan politik Indonesia. Etika politik Pancasila, menurutnya, mendasarkan diri pada lima nilai pokok Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Analisis mendalam Kaelan membuka wawasan tentang bagaimana nilai-nilai tersebut memandu perilaku politik dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.

Penelitian lain oleh Koentjaraningrat (2021) menyoroti dimensi ideologi negara Pancasila. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa Pancasila bukan sekadar seperangkat nilai politik, tetapi juga menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi negara ini, menurutnya, mencerminkan cita-cita dan tujuan bersama bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan. Dalam konteks ini, Koentjaraningrat memberikan perspektif yang mendalam tentang bagaimana ideologi Pancasila menjadi penunjuk arah dalam pembentukan identitas nasional dan tujuan bersama sebagai sebuah negara.

Notonagoro (2020) menghadirkan analisis filosofis terhadap Pancasila, memandangnya sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila, menurutnya, terdiri dari lima sila yang bukan hanya sebagai seperangkat nilai, melainkan sebagai landasan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sila-sila Pancasila

tersebut dianggap sebagai nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya norma-norma moral di tingkat politik, melainkan suatu pandangan hidup yang mendalam dan menyeluruh. Etika politik Pancasila bukan hanya tentang tata cara berpolitik, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai tersebut mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, ideologi negara Pancasila bukan sekadar kerangka konseptual, tetapi sebuah pandangan bersama yang mencerminkan cita-cita bangsa. Pancasila, dengan nilai-nilai seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menciptakan landasan moral yang kuat untuk kehidupan politik dan sosial di Indonesia.

Dalam implementasinya, Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara memegang kedudukan sebagai dasar negara, ideologi negara, dan sumber hukum tertinggi (Achmad Ali, 2021). Kedudukan ini memberikan konsekuensi bahwa Pancasila menjadi landasan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila bukan hanya menjadi retorika, melainkan diwujudkan dalam regulasi dan keputusan pemerintah.

Dalam dimensi filosofis, Pancasila menuntut pemahaman mendalam tentang konsep tersebut. Penelitian ini menggambarkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai seperangkat nilai atau ideologi, melainkan suatu falsafah hidup bangsa Indonesia (M. Nurcholis Madjid, 2020). Pemahaman filosofis ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi Pancasila dalam dinamika kehidupan bangsa yang terus berkembang.

Pentingnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik di Indonesia juga disoroti oleh penelitian-penelitian ini. Etika politik Pancasila mencakup proses pengambilan keputusan yang dijiwai oleh nilai-nilai fundamental Pancasila, menjadi dasar filosofis bangsa Indonesia. Namun, tantangan nyata seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Pendidikan politik dan pembinaan moral menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa generasi penerus juga mampu meneruskan tradisi nilai-nilai Pancasila dalam konteks etika politik. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara lebih mendalam tantangan konkret yang menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dan mengevaluasi peran Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan implementasi nilai-nilai Pancasila dapat diperkuat, mendorong kehidupan politik yang lebih beretika, dan memitigasi risiko praktik politik yang merugikan keutuhan bangsa dan negara.

Pembahasan

Pancasila, sebagai sistem etika politik dan ideologi negara Indonesia, memiliki peran yang mendalam dalam membentuk landasan moral dan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam terkait pengertian Pancasila sebagai sistem etika politik dan

ideologi negara, menelusuri nilai-nilai yang membentuknya, serta menganalisis penerapan Pancasila dalam kehidupan politik di Indonesia, termasuk integrasi nilai-nilai tersebut oleh pemimpin dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Pertama, pengertian Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara dapat dipahami sebagai suatu kerangka nilai dan keyakinan yang menjadi dasar bagi tata nilai politik dan ideologis negara Indonesia. Pancasila bukan sekadar seperangkat norma politik, melainkan juga suatu pandangan hidup yang mencakup dimensi filosofis, politik, dan moral. Sebagaimana dijelaskan oleh Kaelan (2020), Pancasila bukan hanya ideologi politik, tetapi juga sistem nilai dengan lima asas utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Nilai-nilai tersebut membentuk landasan moral yang mendalam dan menyeluruh untuk kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Koentjaraningrat (2021) menjelaskan bahwa Pancasila mencerminkan cita-cita dan tujuan bersama bangsa Indonesia, dan Notonagoro (2020) melihat Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang terdiri dari lima sila yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan sumber hukum tertinggi memberikan konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat retorika, melainkan diwujudkan dalam regulasi dan keputusan pemerintah (Achmad Ali, 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.

Kemudian, penelitian ini fokus pada penerapan Pancasila dalam kehidupan politik di Indonesia. Analisis mendalam dari Kaelan (2020) memberikan gambaran tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila memandu perilaku politik dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Pemimpin dan masyarakat diharapkan mengintegrasikan nilai-nilai fundamental Pancasila dalam proses pengambilan keputusan politik, seperti yang dijelaskan dalam etika politik Pancasila.

Namun, penelitian juga menyoroti tantangan nyata seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tetap menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila memerlukan upaya konkret untuk mengatasi tantangan ini. Diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap konsep filosofis Pancasila (M. Nurcholis Madjid, 2020) untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi dalam dinamika kehidupan bangsa yang terus berkembang.

Pentingnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik di Indonesia disoroti oleh penelitian ini. Etika politik Pancasila harus mencakup proses pengambilan keputusan yang dijawab oleh nilai-nilai fundamental Pancasila, dan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik dan pembinaan moral menjadi instrumen penting dalam memastikan generasi penerus mampu meneruskan tradisi nilai-nilai Pancasila dalam konteks etika politik.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Pendidikan politik dan pembinaan moral menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa generasi penerus juga mampu meneruskan tradisi nilai-nilai Pancasila dalam konteks etika politik. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara lebih mendalam tantangan konkret yang menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik di Indonesia.

Dalam keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengevaluasi peran Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan

implementasi nilai-nilai Pancasila dapat diperkuat, mendorong kehidupan politik yang lebih beretika, dan memitigasi risiko praktik politik yang merugikan keutuhan bangsa dan negara.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pancasila memiliki peran yang mendalam dalam membentuk landasan moral dan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila bukan hanya sekadar ideologi politik, melainkan juga suatu sistem nilai yang menjadi pijakan utama dalam kehidupan politik Indonesia. Etika politik Pancasila mendasarkan diri pada lima nilai pokok Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila juga bukan hanya norma-norma moral di tingkat politik, melainkan suatu pandangan hidup yang mendalam dan menyeluruh. Ideologi negara Pancasila mencerminkan cita-cita dan tujuan bersama bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan. Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai dasar negara, ideologi negara, dan sumber hukum tertinggi, yang mengharuskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.

Dalam penerapannya, penting untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Pendidikan politik dan pembinaan moral menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa generasi penerus juga mampu meneruskan tradisi nilai-nilai Pancasila dalam konteks etika politik. Tantangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara, sehingga diperlukan upaya konkret untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila.

Dalam keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengevaluasi peran Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan implementasi nilai-nilai Pancasila dapat diperkuat, mendorong kehidupan politik yang lebih beretika, dan memitigasi risiko praktik politik yang merugikan keutuhan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, Tinus, A., & Wibowo, A. P. (2022). Pandangan partai Politik terhadap pascasila sebagai etika politik. *Jurnal Civic Hukum*, 7(November), 1–9.
- Economics, P., Khaldoon, A., Ahmad, A., Wei, H., Yousaf, I., Ali, S. S., Naveed, M., Latif, A. S., Abdullah, F., Ab Razak, N. H., Palahuddin, S. H., Tasneem Sajjad , Nasir Abbas, Shahzad Hussain, SabeehUllah, A. W., Gulzar, M. A., Zongjun, W., Gunderson, M., Gloy, B., Rodgers, C., Orazalin, N., Mahmood, M., ... Ishak, R. B. (2020). PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DAN HUKUM NEGARA INDONESIA. *Corporate Governance (Bingley)*, 10(1), 54–75.
- Hamja, B. (2017). Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Bangsa. *Justicia*, 3(9), 11–20.
- Muzakki, I. H. (2023). *Pancasila Sebagai Sistem Etika Dalam Mengimplementasikan Moderasi Bergama Di Indonesia*. 3, 389–399.
- Siswantara, Y. (2023). Implementasi Pendidikan Berbasis Pancasila Untuk Kepemimpinan Anti Korupsi: Studi Kualitatif tentang Nilai dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Pembumian Pancasila* , 3(1), 1–10.
- Sugara, H., & Mutmainnah, F. (2020). Urgensi penguatan etika demokrasi dalam membangun generasi anti anarkisme. *Prosiding Seminar Nasional Kahuripan I Tahun*, 62–67.

- Sulistiani Putri, F., & Anggtaeni Dewi, D. (2020). Implementasi Pancasila Sebagai Sistem Etika. *EduPsyCouns Journal*, 3(1), 176–184. <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/1327/517>
- Yanto, D. (2017). Etika Politik Pancasila. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah Kalimantan*, 15(27), 23–28. <https://jurnal.uin-antasar.ac.id/index.php/ittihad/article/view/1596>
- Yuliana Putri Regina, F. U. N. (2020). *Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia*.